

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara Demokrasi menjadikan Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi dan juga sebagai cerminan masyarakat agar memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak, serta menyampaikan haknya sebagai warga negara. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat itulah, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik disuatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung pada kontestasi politik. Salah satunya ialah pada saat Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Kota Medan Sumatera Utara.

Pada Pemilihan Kepala Daerah kali ini dilaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota secara langsung oleh rakyat dengan tetap melakukan beberapa perbaikan mendasar atas pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan. Undang-Undang No.10 Tahun 2016

telah mengatur terkait pemilihan kepala daerah serta mengatur bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka memilih Walikota dan Wakil Walikota sebagai kepala daerah di Kota Medan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan dua pasangan calon kandidat yakni dengan nomor urut 1 dipegang oleh pasangan Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi sedangkan Bobby Nasution dan Aulia Rachman mendapat nomor urut 2. Kedua pasangan calon ini masing-masing memiliki partai pengusung, dimana pasangan Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi diusung oleh dua partai saja diantaranya ialah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara itu pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman diusung oleh beberapa partai pengusung diantaranya ialah Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pada Pemilihan Kepala Daerah kali ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Medan membuka sekitar 4303 Tempat Pemilihan Suara yang nantinya bisa diakses oleh masyarakat yang ingin memberikan suaranya dan berpartisipasi pada Pilkada kali ini yakni diperkirakan sebanyak 1.601.001 warga Kota Medan yang terdiri atas 781.953 laki-laki dan 819.048 perempuan yang nantinya mereka akan memilih kedua pasangan calon yang bertarung pada Pilkada Kota Medan.

Suasana pada pilkada kali tentunya sedikit berbeda dengan pilkada sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah didunia termasuk Indonesia dan hal ini bertepatan dengan diadakannya Pemilihan Kepala Daerah di beberpa wilayah di Indonesia dan tentunya warga masyarakat cukup cemas jika harus mencoblos langsung ke TPS. Maka dari itu dalam akun Instagram resmi KPUD Kota Medan, disana disampaikan langsung oleh ketua KPU Kota Medan yang meminta kepada masyarakat Kota Medan untuk tidak ragu datang ke TPS dalam rangka menggunakan hak pilihnya. Hal ini dikarenakan pihak KPUD Kota Medan telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat di setiap TPS.

KPUD Kota Medan bersama Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 telah menerapkan prosedur baru untuk pemilih yang datang ke TPS sebagai upaya meminimalisir penyebaran Covid-19. KPU mengurangi jumlah pemilih per TPS dari 800 orang menjadi maksimal 500 orang per TPS. Baik pemilih maupun KPPS wajib menggunakan masker selama berada di TPS, para pemilih dihimbau untuk menggunakan masker sejak dari rumah. Petugas KPPS juga wajib mengikuti tes cepat atau rapid test Covid-19. Sebelum bertugas, jadwal pencoblosan juga diatur agar tidak terjadi kerumunan misalnya C6 terdapat tulisan jam tertentu bagi pemilih diperbolehkan untuk mencoblos. Petugas KPPS mengenakan sarung tangan selama bertugas, dan setiap pemilih disediakan sarung tangan plastik di TPS. Setiap pemilih yang akan masuk dicek suhu tubuhnya. Hal ini juga disampaikan oleh juru bicara Satgas Covid-19 Sumut yakni Aris Yudhariansyah mengatakan bahwa:

“Semua sudah pakai protokol kesehatan di TPS, gak ada kerumunan, ia juga menjelaskan bahwa KPU telah merancang pelaksanaan teknis pemilu yang mengacu pada protokol kesehatan ketat. Salah satunya adalah memfasilitasi petugas pemungutan suara (PPS) dengan masker kain, sarung tangan, dan face shield” (Fitriani, 2020)

Tentunya melalui prosedur tersebut diharapkan kepada masyarakat agar datang ke tempat pemilihan suara untuk memberikan suaranya tanpa rasa takut akan penyebaran Covid-19. Seperti yang terlihat pada TPS 22 tepatnya dilokasi pencoblosan yang akan dilakukan oleh calon urut nomor 2 yaitu Bobby Nasution bersama istrinya Kahiyang ayu. Diperkirakan Bobby dan istri akan mendatangi TPS sekitar pukul 10 pagi untuk memberikan suaranya pada pilkada kali ini. TPS 22 ini sejak pagi warga sudah berdatangan untuk mencoblos, TPS ini dibuka pukul 07:00 pagi yang mana sebelum dibuka TPS ini disemprotkan disinfektan terlebih dahulu agar steril dari virus corona dan tidak hanya ditempat pencoblosan atau pemilihan tetapi juga lapangan atau parkir. Jika melihat hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa KPUD Kota Medan telah mempersiapkan dengan baik segala protokol kesehatan dalam pilkada kali ini guna mencegah penyebaran covid-19.

Terlepas dari itu, hasil akhir pilkada menunjukkan bahwa pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman keluar sebagai pemenang dan naik sebagai Walikota Dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2020 dengan perolehan suara 53,45 persen dari total suara sah atau mengumpulkan 393,327 suara, sementara rivalnya pasangan Akhyar Nasution dan Alfarisi memperoleh 342,580 suara atau 46,55 persen. Total suara sah dalam pilkada kali ini mencapai 735.907 suara, sedangkan yang tidak sah 12.915 suara. Dengan begitu total 748.882 orang menggunakan

hak pilihnya. Namun pada pilkada kali ini angka golput juga merupakan angka tertinggi mengalahkan persentase perolehan suara kedua pasangan calon yang bertarung. Hal ini tentunya akan sulit untuk mengatakan bahwa kemenangan calon sudah representatif dengan kemauan sebagian masyarakat, lebih jauh lagi efek turunannya ialah sukar untuk membangun logika tentang dukungan maksimal dari masyarakat terhadap pemerintah yang akan datang. Jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pilkada kali ini mencapai 886.964 orang atau 54,20 persen dari 1.635.846 total pemilih.

Pada Pilkada 2015 terdapat 24.336 suara tidak sah. Dimana jumlah itu mencapai 5,04 persen dari total 507.351 pemilih yang menggunakan haknya. Angka partisipasi pemilih mencapai 507.351 dimana jumlah tersebut hanya 25,56 persen dari keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu 1.985.096 pemilih, selebihnya warga tidak menggunakan hak pilihnya dengan presentase mencapai 1.477.745 atau 74,44 persen dari DPT. Maka terlihat bahwa angka golput cukup tinggi pada pilkada 2015 silam dan tentunya daya tarik masyarakat untuk ikut berpartisipasi juga menjadi salah satu pemicu tingginya angka golput pada Pilkada 2015.

Sementara itu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Tahun 2020 daya tarik masyarakat tidak lepas dari dua faktor, hal ini disampaikan oleh pengajar Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) Medan yakni Faisal Andri Mahrawa, ia menyebutkan bahwa faktor pertama yang menjadi pemicunya ialah kinerja penyelenggara yang terus mengampanyekan pilkada aman ditengah pandemi dengan jaminan protokol kesehatan yang relatif

ketat. Kedua ialah faktor daya tarik kedua pasangan calon yang bertarung memperebutkan simpati pemilih. Faktor kedua ini tentu tidak lepas dari sosok Muhammad Bobby Nasution sebagai sosok menantu Presiden Joko Widodo yang maju sebagai calon Walikota Medan. (Admin, 2020) Namun tidak selamanya faktor daya tarik berkorelasi dengan tingkat partisipasi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pada pilkada 2020 angka golput lebih membaik dalam artian lebih menurun dari pilkada 2015, Namun tetap saja pada Pemilihan Walikota tahun 2020 justru golput yang keluar sebagai pemenang mengalahkan jumlah suara yang diperoleh kedua kandidat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. Pada kenyataannya golput tetap menjadi persoalan dalam setiap pemilihan kepala daerah. (Muhardiansyah, 2020)

Pada Pilkada kali ini tersebar di sekitar 21 kecamatan dikota Medan diantaranya ialah Kecamatan Medan Kota, Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Denai, Medan Barat, Medan Deli, Medan Tuntungan, Medan Belawan, Medan Amplas, Medan Area, Medan Johor, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Tembung, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Baru, Medan Perjuangan, Medan Timur Dan Medan Selayang. Dari banyaknya suara yang diperoleh oleh kedua pasangan calon, hal itu didapat dari 21 kecamatan tersebut. Dan setiap calon memiliki daerah unggulnya masing-masing.

Contohnya saja pasangan Akhyar Nasution dan Alfarisi yang memperoleh keunggulan di Kecamatan Medan Tembung dengan perolehan suara mencapai 22.329 suara, sementara pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman hanya memperoleh suara sebanyak 20.557 suara. Di Kecamatan Medan Tembung sendiri

angka golput juga terbilang cukup memiliki angka yang lumayan hal ini terlihat dari perolehan data yakni angka tersebut mencapai 51.786 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dari jumlah pemilih sebanyak 95.354 atau sebanyak 54,31% . Sementara pada tahun 2015 jumlah orang yang tidak memilih sebanyak 90.196 dari jumlah pemilih sebanyak 122.456. Tentunya angka golput yang tetap tinggi pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan di Kecamatan Medan Tembung ini perlu diketahui apakah penyebab hal tersebut bisa terjadi. Sehubungan dengan ulasan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Fenomena Golongan Putih di Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020 (Studi Kecamatan Medan Tembung Kota Medan)”**

1.2. Batasan masalah

Pada penelitian kualitatif masalah bertumpu pada suatu fokus. Fokus disini berarti pembatasan masalah itu sendiri yaitu suatu usaha pembatasan dalam sebuah penelitian yang bertujuan agar mengetahui secara jelas tentang batasan-batasan mana saja atau untuk mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti supaya sasaran penelitian tidak terlalu luas. (Anggito & Setiawan, 2018) Dengan demikian batasan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Gambaran Golongan Putih Di Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020 di Di Kecamatan Medan Tembung Kota Medan
2. Faktor-faktor penyebab Meningkatnya Angka Golput Di Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020 Di Kecamatan Medan Tembung Kota Medan

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Gambaran Golongan Putih Di Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020 di Di Kecamatan Medan Tembung Kota Medan?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab Meningkatnya Angka Golput Di Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020 Di Kecamatan Medan Tembung Kota Medan?

1.4. Tujuan penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. (Sugiyono, 2013) Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, Maka tujuan penelitian pada laporan ini ialah:

1. Untuk mengetahui gambaran golongan putih di masyarakat pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020 di Di Kecamatan Medan Tembung Kota Medan
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab meningkatnya angka golput di masyarakat pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020 Di Kecamatan Medan Tembung Kota Medan

1.5. Manfaat penelitian

- a) Manfaat Praktis

1. Bagi penulis ialah untuk dapat menambah pengetahuan dan mampu menjelaskan terkait Fenomema Golput Di Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020 Di Kecamatan Medan Tembung.
2. Bagi jurusan PPKn ialah untuk menambah literatur-literatur bacaan terkait fenomena golput yang terjadi di masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sejenis.
3. Bagi masyarakat ialah agar mereka mengetahui seperti apakah fenomena golput yang terjadi di masyarakat pada saat Pemilihan Kepala Daerah khususnya pada Pemilihan Walikota Medan.

b) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ialah manfaat dari penelitian seperti untuk menguji kebenaran atau relevansi teori dengan kenyataan, menemukan teori baru atau untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Adapun manfaatnya ialah diharapkan agar penelitian ini mampu memberikan dampak positif dan menjadi sumber literatur yang dapat membantu peneliti selanjutnya yang sekiranya mengangkat topik yang sama dengan ini, namun dengan kajian yang sedikit berbeda. Semoga penelitian ini dapat diterima dengan baik dan menjadi standar penelitian yang baku.